

PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM IMPLEMENTASI ALOKASI DANA DESA DI DESA PANGGUNGHARJO

CAPACITY BUILDING THE PANGGUNGHARJO VILLAGE GOVERNMENT IN IMPLEMENTATION OF RURAL FUND ALLOCATION IN PANGGUNGHARJO VILLAGE, SEWON COUNTY AREA, BANTUL REGENCY

Oleh: Albertus Christian Ade Darmawan dan Francisca Winarni, M.Si., Fakultas Ilmu Sosial UNY,
darmawan1709@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pengembangan kapasitas pemerintah desa dalam implementasi alokasi dana desa di Desa Panggungharjo beserta faktor pendukung dan penghambatnya. Desain penelitian adalah metode deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian adalah Kepala Desa Panggungharjo, Sekretaris Desa Panggungharjo, dan Kaur Perencanaan Desa Panggungharjo. Instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri dengan bantuan pedoman wawancara, pedoman observasi, kamera, dan alat perekam. Data ini diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan metode. Teknik analisis data menggunakan metode interaktif yang dikembangkan Milles dan Huberman. Hasil penelitian adalah pengembangan SDM pemerintah desa Panggungharjo dilakukan melalui pelatihan, pemberian beasiswa, dan bimbingan teknis, penguatan organisasi pemerintah desa Panggungharjo dilakukan melalui pendampingan, pemberian tunjangan kinerja, dan *monitoring*, reformasi kelembagaan dilakukan melalui kerjasama dengan dinas lain dan rekrutmen pegawai. Adapun faktor pendukungnya yaitu komitmen perangkat desa. Faktor penghambatnya yaitu tidak ada waktu pelatihan yang intensif.

Kata kunci: *pengembangan kapasitas, pemerintah desa, alokasi dana desa*

Abstract

This research aimed to determine the capacity building efforts of village governments in the implementation of rural fund allocations in Panggungharjo village along with their supporting factors and barriers. The research design used descriptive method with qualitative approach. The subjects of this research were the Chief, Secretary, and Panggungharjo Village Planning Chief. The research instrument was the researcher himself with the help of interview and observation guidelines, cameras, and recording devices. This data was obtained through interviews, observation, and documentation. Technique examination of data validity used triangulation of source and methods. The data analysis technique uses interactive methods developed by Milles and Huhberman. The results of the research were human resource development of the Panggungharjo village government was done through training, scholarship and technical guidance, organizational strengthening of the Panggungharjo village government was done through mentoring, performance allowances, and monitoring, institutional reform was done through collaboration with other agencies and employee recruitment. The supporting factors were the commitment of village officials. The inhibiting factor were there is no intensive training time.

Keyword: capacity building, village government, rural fund allocation

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional terus diupayakan agar pembangunan daerah serta pembangunan desa dan kota semakin seimbang. Pembangunan nasional meliputi pembangunan daerah dan pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat serta meningkatkan kemampuan daerah dalam pengelolaan sumber daya ekonomi yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kemajuan daerah secara efektif dan efisien. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang didukung Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi awal bagi desa untuk dapat menunjukkan kapasitasnya.

Desa dijadikan sasaran penyelenggaraan aktifitas pemerintahan dan pembangunan, karena pemerintahan desa merupakan pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan di Indonesia yang menentukan keberhasilan pembangunan nasional secara menyeluruh. Desa juga merupakan daerah otonom karena memiliki kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang memiliki kewenangan

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat.

Pembangunan desa secara mandiri serta dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat adalah tugas pemerintah desa sebagai pemerintah terkecil dan terdekat dengan masyarakat. Kedudukan pemerintah desa yang dekat dengan masyarakat mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan dengan pemerintah kabupaten yang memiliki ruang lingkup permasalahan yang lebih luas. Hal tersebut menjadikan pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan masalah yang ada, potensi yang dimiliki, kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan desa yang sudah ditetapkan.

Sumber pendapatan desa berasal dari Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa (PADes), Transfer, dan Pendapatan Lain-Lain. Kelompok transfer terdiri dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), bagian dari hasil pajak daerah Kabupaten/Kota dan retribusi daerah serta bantuan keuangan provinsi dan kabupaten. Alokasi Dana Desa sangat berpengaruh dalam pembangunan desa, sementara pendapatan desa lainnya kurang berdampak bagi pembangunan desa.

Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diberikan kepada kabupaten dari

dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai yang dialokasikan kepada pemerintah desa. Alokasi Dana Desa digencarkan melalui adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/1841/SJ tanggal 17 Agustus 2006 tentang Perintah Penyediaan Alokasi Dana Desa kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota Sebagai Pelaksana, yang ditujukan kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ini berisi mengenai percepatan pelaksanaan dan perealisasi Alokasi Dana Desa di tiap Kabupaten/Kota. Alokasi Dana Desa dapat digunakan guna mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat desa secara mandiri tanpa menunggu program-program dari pemerintah Kabupaten/Kota.

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan terdepan dalam melaksanakan urusan kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa diperlukan adanya kapasitas perangkat desa yang memadai. Sedangkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik sulit untuk terwujud bilamana kapasitas aparatur pemerintah desa tidak kompeten, tanpa kapasitas yang memadai mereka akan gagal dalam menjalankan tugas dan fungsi desa.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa yang menjadi fokus

adalah bagaimana pemerintahan desa mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan mampu meningkatkan daya saing wilayahnya. Apabila urusan yang menjadi kewenangan desa dapat terlaksana dengan baik, maka apa yang menjadi fokus pemerintah desa tersebut dapat terwujud. Dalam implementasinya, pemerintah desa memiliki berbagai permasalahan yang langsung maupun tidak langsung menghambat pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan. Demi terwujudnya pembangunan desa yang efektif dan efisien, tentunya dibutuhkan perencanaan yang matang, diperlukan sumber daya manusia terutama perangkat desa yang profesional yang meliputi pendidikan, pengetahuan dan keterampilan sesuai tugas yang diemban.

Tuntutan masyarakat akan pemenuhan kebutuhannya, mengharuskan pemerintah mampu memberikan pelayanan yang baik. Banyak masalah terkait dengan pelayanan publik, diantaranya adalah ketidakpastian waktu, biaya, dan cara pemberian pelayanan kepada masyarakat dan hal lainnya yang menyebabkan masyarakat tidak mendapatkan kepuasan. Berbagai macam masalah tersebut yang menjadikan masyarakat merasa kualitas pelayanan pemerintah desa masih buruk.

Maka dari itu diperlukan adanya peningkatan kemampuan pemerintah desa yang berkompeten terutama dalam memberikan pelayanan pada masyarakat sehingga dibutuhkan adanya pengembangan kapasitas (*capacity building*). Pengembangan kapasitas merupakan bagian penting di berbagai aspek kehidupan, salah satunya didalam instansi pemerintahan, pengembangan kapasitas penting untuk meningkatkan kemampuan atau menjadikan kinerja aparatur lebih baik dalam menjalankan tugasnya.

Pengembangan kapasitas pemerintah desa kini menjadi hal yang sangat penting bagi efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Desa, untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri dan sejahtera. Termasuk kemampuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintahan desa seperti bidang manajemen pemerintahan desa, penyusunan perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa.

Dengan terlaksananya pengembangan kapasitas pemerintah desa secara umum dapat menciptakan pemerintah desa yang mempunyai kemampuan, kepekaan dan antisipatif terhadap perubahan yang terjadi, meningkatnya kemampuan dalam mengambil tindakan yang cepat, tepat dan akuntabel terhadap permasalahan yang

ada. Serta meningkatkan fungsi instansi dalam memberikan pelayanan publik secara optimal.

Kapasitas pemerintah desa di Desa Panggungharjo masih terdapat berbagai kekurangan. Salah satu contohnya adalah mengenai ketidaktepatan waktu, pemerintah desa belum bisa melaporkan laporan pertanggung jawaban (LPJ) mengenai Alokasi Dana Desa secara tepat waktu yang disebabkan keterbatasan SDM yang dimiliki oleh pemerintah desa. Hal ini mengakibatkan munculnya masalah lain antara lain pelaksanaan pencairan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bantul mengalami keterlambatan, yang juga berdampak pada Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bantul tidak dapat terserap sepenuhnya, sehingga pembangunan di Kabupaten Bantul tertunda.

Upaya pengembangan kapasitas (*capacity building*) pemerintah Desa Panggungharjo, dalam penelitian ini dibahas menggunakan teori dimensi pengembangan kapasitas (*capacity building*) yang dijelaskan oleh Grindle. Grindle (Nugroho, Wijaya, Said, 2015) mengungkapkan apabila *capacity building* menjadi serangkaian strategi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan responsivitas, maka *capacity building* tersebut harus memusatkan perhatian kepada Pengembangan sumber daya manusia

(SDM) pemerintah desa, Penguatan organisasi pemerintah desa, Reformasi kelembagaan pada kelembagaan pemerintah Desa Panggungharjo.

Dimensi pengembangan sumber daya manusia (SDM), fokus kegiatan berupa pengadaan atau penyediaan personil yang profesional dan memiliki kemampuan teknis. Tipe kegiatan seperti training, praktek langsung, pengaturan kondisi dan lingkungan kerja, dan rekrutmen yang tepat. Dimensi penguatan organisasi berfokus pada tata manajemen untuk meningkatkan kinerja dari peran dan fungsi yang ada. Tipe kegiatan seperti menata sistem insentif, pemanfaatan personil, kepemimpinan, budaya organisasi, komunikasi, dan struktur manajerial. Reformasi kelembagaan, berfokus pada perubahan sistem dan kelembagaan yang ada. Tipe kegiatan seperti melakukan perubahan aturan main sistem ekonomi dan politik yang ada, perubahan kebijakan dan regulasi, dan reformasi sistem kelembagaan.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif karena kajian penelitian yang kompleks serta membutuhkan pengertian

makna secara mendalam agar mendapatkan data yang valid.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 8 Mei 2018 hingga 17 Desember 2018.

Subjek Penelitian

1. Kepala Desa Panggungharjo
2. Sekretaris Desa Panggungharjo
3. Kepala Urusan Pembangunan dan Keuangan

Data dan Sumber Data

Menurut Sugiyono (2013) kriteria data dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti. Data yang pasti adalah data yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya, bukan data yang sekedar yang terlihat, terucap, tetapi data yang mengandung makna dibalik yang terlihat dan terucap terkait pengembangan kapasitas pemerintah desa dalam implementasi alokasi dana desa di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul.

Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini merupakan peneliti dengan mengembangkan pedoman wawancara dan observasi dan bantuan alat pengumpulan data seperti *recorder dan camera*.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Penelitian ini menggunakan observasi non-partisipan.

2. Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara semiterstruktur yakni peneliti telah menyiapkan pedoman wawancara terlebih dahulu namun pertanyaan tersebut dapat diperluas sesuai dengan jawaban narasumber.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah laporan-laporan kegiatan pengembangan kapasitas pemerintah Desa Panggungharjo.

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Peneliti membandingkan data hasil pengamatan di lapangan dengan data hasil wawancara. Peneliti juga membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen. Selain itu, peneliti melakukan pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data interaktif model Miles dan Huberman

meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa Panggungharjo

Upaya pengembangan kapasitas pemerintah desa dalam implementasi alokasi dana desa di Desa Panggungharjo dibahas menggunakan teori dimensi pengembangan kapasitas yang dijelaskan oleh Grindle (Nugroho, Wijaya, Said, 2015:1012) sebagai berikut.

Pengembangan SDM menurut Grindle dalam Nugroho, Wijaya, Said (2015:1012) dilakukan dengan pengadaan atau penyediaan personil yang profesional dan memiliki kemampuan teknis. Pengembangan SDM mencakup pengetahuan, ketrampilan, kompetensi, etika, dan etis kerja. Bentuk kegiatan dalam upaya pengembangan kapasitas SDM berupa kegiatan *training*, praktik langsung, pengaturan kondisi dan lingkungan kerja, serta rekrutmen yang tepat.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan SDM pemerintah Desa Panggungharjo yaitu melalui pelatihan. Pelatihan diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dan BPKP setiap tahun, akan tetapi pelatihan ini hanya dilakukan satu kali pertemuan

saja. Jadi masih belum ada intensitas waktu khusus untuk pelatihan yang diberikan kepada perangkat desa Panggungharjo. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelatihan yang diberikan belum terserap sepenuhnya oleh perangkat desa Panggungharjo.

Upaya selanjutnya yaitu melalui pemberian beasiswa kepada perangkat desa. Pemerintah desa Panggungharjo memberikan beasiswa kepada perangkat desa pada tahun 2015 dan 2016, dimana pada tahun 2015 beasiswa diberikan kepada tiga perangkat desa untuk kuliah di APMD Yogyakarta. Dan pada tahun 2016 pemberian beasiswa kepada empat perangkat desa untuk kuliah di ruang kelas Kantor Kelurahan Desa Panggungharjo. Pemberian beasiswa ini didukung dari dana anggaran APBD Daerah Istimewa Yogyakarta.

Upaya pengembangan kapasitas sumber daya manusia pemerintah desa panggungharjo dilakukan melalui bimbingan teknis. Bimbingan teknis sudah dilakukan beberapa kali yakni pada tahun 2016-2017, dalam hal ini perwakilan perangkat desa yang hadir dalam bimbingan teknis hanya Carik Desa, dan Bagian Keuangan saja. Dari beberapa bimbingan teknis yang dilaksanakan ternyata peserta yang mengikuti kegiatan tersebut hanya Carik desa dan Bagian keuangan desa saja. Tidak semua anggota

perangkat desa bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan bimbingan teknis.

Meskipun sudah ada upaya pengembangan SDM pemerintah Desa Panggungharjo, namun pelaksanaannya belum optimal. Pelatihan diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dan BPKP setiap tahun, akan tetapi pelatihan ini hanya dilakukan satu kali pertemuan saja. Jadi masih belum ada intensitas waktu khusus untuk pelatihan yang diberikan kepada perangkat desa Panggungharjo. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelatihan yang diberikan belum terserap sepenuhnya oleh perangkat desa Panggungharjo. Hal ini belum sesuai dengan teori persyaratan-persyaratan pengembangan kapasitas yang diungkapkan oleh Yuwono. Yuwono (Soeprapto, 2006:21) menjelaskan, salah satu persyaratan dalam pengembangan kapasitas yaitu akses terhadap informasi. Pengembangan kapasitas harus dimulai dengan memberikan akses dan kesempatan untuk memperoleh informasi secara cukup baik dan efektif guna mendukung program yang akan dilaksanakan.

Dimensi penguatan organisasi menurut Grindle dalam Nugroho, Wijaya, Said (2015:1012) berfokus pada tata manajemen untuk meningkatkan kinerja dari peran dan fungsi yang ada. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, upaya yang dilakukan untuk

penguatan pemerintah desa Panggungharjo yaitu melalui pendampingan, pemberian tunjangan kinerja, dan *monitoring*. Pendampingan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul bersama BPKP terhadap kegiatan pelaksanaan alokasi dana desa. Ada pemerintah daerah Kabupaten Bantul yang selalu mendampingi kegiatan pemerintah desa Panggungharjo terutama dalam pelaksanaan alokasi dana desa. Dalam hal ini, Bapak Wahyudi selain menjabat sebagai Lurah Desa Panggungharjo, beliau juga diberi tugas untuk mengarahkan perangkat desa Panggungharjo dalam pelaksanaan alokasi dana desa.

Upaya lainnya dalam penguatan organisasi pemerintah desa Panggungharjo yaitu melalui pemberian tunjangan kinerja kepada perangkat desa. Upaya selanjutnya yaitu melalui *monitoring*. *Monitoring* ini dilakukan oleh BPKP dan KPK. *Monitoring* ini bertujuan untuk mengawasi bagaimana pemerintah desa Panggungharjo memanfaatkan dana alokasi dana desa. *Monitoring* dilakukan setelah dana alokasi dana desa diberikan kepada pemerintah desa Panggungharjo.

Upaya lainnya dalam penguatan organisasi pemerintah desa Panggungharjo yaitu melalui pemberian tunjangan kinerja kepada perangkat desa. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh Eade (2007:23) yaitu salah satu strategi utama yang dilakukan

dalam pengembangan kapasitas adalah kemampuan fiskal. Pemberian tunjangan kinerja berasal dari dana APBD. Tujuan pemberian tunjangan kinerja ini untuk meningkatkan kinerja perangkat desa agar dalam pelaksanaan alokasi dana desa tidak mengalami hambatan dan dapat mencapai tujuan.

Dimensi reformasi birokrasi menurut Grindle dalam Nugroho, Wijaya, Said (2015:1012) berfokus pada pengembangan kapasitas melalui perubahan sistem dan kelembagaan yang ada. Upaya-upaya yang telah dilakukan berkaitan dengan reformasi birokrasi adalah adanya kerjasama dengan lembaga/dinas lain dan rekrutmen pegawai.

Pemerintah desa Panggungharjo menjalin kerjasama dengan kecamatan lain dalam pengelolaan alokasi dana desa. Dalam hal ini, adanya kerjasama dengan kecamatan lain dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Bentuk kerjasama yang dilakukan dengan kecamatan lain berupa adanya bantuan perangkat desa dari kecamatan lain untuk membantu proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

Upaya lainnya melalui rekrutmen pegawai yang dilakukan pemerintah desa Panggungharjo. Dalam proses pelaksanaan alokasi dana desa, keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah desa Panggungharjo dapat menjadi penghambat.

Oleh karena itu pemerintah desa Panggungharjo melakukan rekrutmen pegawai dengan cara memberi informasi mengenai rekrutmen tersebut pada *website* desa.

Upaya reformasi kelembagaan dalam pelaksanaan pengembangan kapasitas pemerintah desa Panggungharjo sudah dilakukan. Menurut Warsito dan Yuwono (Anggraini, Mindarti, Hermawan, 2015:1094), reformasi kelembagaan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi pengembangan kapasitas. Reformasi kelembagaan pada intinya menunjuk kepada pengembangan iklim dan budaya yang kondusif dalam mencapai suatu tujuan.

Upaya-upaya pengembangan kapasitas pemerintah desa Panggungharjo meliputi pengembangan SDM, penguatan organisasi, dan reformasi kelembagaan yang telah dilakukan mampu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pemerintah desa Panggungharjo. Pemerintah desa Panggungharjo mampu menyelesaikan pelaporan alokasi dana desa sesuai waktu sehingga tidak menghambat proses alokasi dana desa tahun selanjutnya.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa Panggungharjo

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung yang mempengaruhi pengembangan kapasitas pemerintah desa panggungharjo yaitu adanya komitmen perangkat desa. Dalam hal ini, perangkat desa memiliki komitmen yang tinggi dalam mengembangkan kapasitas agar dapat mengelola alokasi dana desa dengan maksimal. Hal ini sesuai dengan pernyataan Warsito dan Yuwono (Anggraini, Mindarti, Hermawan, 2015:1094) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kapasitas. Menurutnya, salah satu faktor yang mempengaruhi kesuksesan program pengembangan kapasitas adalah komitmen bersama. Tanpa adanya komitmen baik dari pimpinan maupun bawahan, sangatlah mustahil mengharapkan program pengembangan kapasitas bisa berjalan.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat yang mempengaruhi pengembangan kapasitas pemerintah desa Panggungharjo yaitu tidak adanya waktu pelatihan yang diberikan terhadap perangkat desa yang tentu. Jadi

pelatihan diberikan hanya sekali saja sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Kondisi ini sesuai dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dalam pengembangan kapasitas yang dijelaskan Warsito dan Yuwono (Anggraini, Mindarti, Hermawan 2015:1094), yakni reformasi peraturan. Maka sudah semestinya reformasi peraturan ini dibangun agar pelaksanaan pengembangan kapasitas pemerintah desa dapat dicapai.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan kapasitas pemerintah desa dalam implementasi alokasi dana desa di desa Panggungharjo telah dilakukan melalui berbagai upaya yang tercermin dalam tiga dimensi pengembangan kapasitas.

Dimensi pengembangan SDM pemerintah desa dilakukan melalui pelatihan pengembangan kapasitas perangkat desa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dua kali pemberian beasiswa kepada perangkat desa untuk kuliah pada tahun 2015 dan 2016, bimbingan teknis pada tahun 2016 dan 2017 oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Meskipun sudah ada upaya pengembangan SDM pemerintah

desa Panggungharjo, namun pelaksanaannya belum optimal. Pelatihan yang diberikan belum dilakukan secara berkala, tidak ada jadwal yang pasti terkait kapan pelatihan akan dilakukan.

Dimensi penguatan organisasi pemerintah desa Panggungharjo dilakukan melalui pendampingan, pemberian tunjangan kinerja, dan *monitoring*. Upaya penguatan organisasi pemerintah desa Panggungharjo sudah berjalan maksimal. Kegiatan pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dan KPK berjalan dengan baik.

Reformasi kelembagaan dilakukan melalui kerjasama dengan diinas lain dan rekrutmen pegawai. Untuk mengatasi keterbatasan SDM yang dimiliki, pemerintah desa Panggungharjo mengatasi hambatan tersebut dengan cara kerjasama dengan dinasi lain serta mengadakan rekrutmen pegawai.

Faktor pendukung pelaksanaan pengembangan kapasitas pemerintah Desa Panggungharjo dalam implementasi alokasi dana desa yaitu adanya komitmen perangkat desa. Adapun faktor penghambatnya yaitu belum adanya jadwal pelatihan yang diberikan secara pasti.

Saran

1. Pemerintah desa Panggunharjo sebaiknya mengadakan kegiatan pengembangan kapasitas SDM secara berkala dengan intensitas waktu yang pasti.
2. Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul sebaiknya meningkatkan intensitas kegiatan bimbingan teknis kepada perangkat desa Panggunharjo.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Mindarti, Hermawan. (2015). *Pengembangan Kapasitas Pegawai Untuk Mewujudkan Good Governance*. Malang: UB.
- Eade, D. (2007). Capacity Building: Who Builds Whose Capacity? *Journal Development in Practice*, 17, 630-639
- Kementrian Dalam Negeri. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Nugroho, Wijaya, Said. (2015). *Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Dalam Upaya Mewujudkan Good Governance*. Malang: UB.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
- Sugiyono. (2013). *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Research & Development*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/1841/SJ tanggal 17 Agustus 2006 tentang Perintah Penyediaan Alokasi Dana Desa kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota.